



Pengaruh Transaksi Digital QRIS dengan Cash Terhadap Peredaran Uang di Indonesia

Cinta Rahmi

Manajemen, STIE Ganesha

Peby Yanti

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Adinda Dyah Kumala

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Daffa Isfalana

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Riyanda Lastthio

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir H. Djuanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten

Korespondensi penulis: adindadyahkumala@gmail.com

Abstract. This research aims to find out how Islam views the QRIS payment method and how QRIS can influence the circulation of physical money among Indonesian people by using the literature study method in data collection techniques. The method used in this research is Quantitative Method and Literature Study. The object of this research discusses QRIS digital payment technology which can influence the circulation of cash at banks in Indonesia. The use of QRIS digital transactions with cash has great potential to change the pattern of money circulation in Indonesia towards a more efficient, transparent and safe direction. The results of this research also show that with the existence of digital QRIS transactions, cash circulation is still stable and has not experienced a decline. So, even though QRIS digital transactions do not affect money circulation.

Keywords: payment methods, money circulation, society

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pandangan Islam tentang metode pembayaran QRIS serta bagaimana QRIS dapat mempengaruhi peredaran uang fisik di kalangan masyarakat Indonesia dengan menggunakan metode studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif dan Studi Pustaka. Objek penelitian ini membahas teknologi pembayaran digital QRIS yang dapat mempengaruhi peredaran uang cash pada bank di Indonesia. penggunaan transaksi digital QRIS dengan cash memiliki potensi besar untuk mengubah pola peredaran uang di Indonesia menuju ke arah yang lebih efisien, transparan, dan aman. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya transaksi digital QRIS, Peredaran uang Cash masih stabil dan tidak mengalami penurunan. Jadi, walaupun transaksi digital QRIS tidak mempengaruhi peredaran uang.

Kata kunci: metode pembayaran, peredaran uang, masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengenal metode pembayaran *cashless* terutama ketika wabah COVID-19 tengah melanda. Di Indonesia dikenal dengan QRIS (*quick response code Indonesian standard*). Metode pembayaran ini merupakan cara yang baru di Indonesia tengah naik daun karena pengguna QRIS tidak perlu menggunakan uang fisik untuk pembayaran. Dalam penerapannya, QRIS menggunakan code QR yang dapat di pindai melalui gawai pembeli yang terhubung dengan aplikasi *mobile banking* atau dompet elektronik. Saat ini metode pembayaran *cashless* dengan QRIS sudah ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia mulai dari toko-toko besar sampai pedagang kaki lima karena kemudahannya. Masyarakat Indonesia yang menggunakan metode QRIS bertambah tiap tahunnya karena kemudahan yang

ditawarkan serta metode pembayaran yang mudah dipahami bagi masyarakat penghuni kota-kota besar sebagai metode pembayaran yang sah.

Dalam agama Islam transaksi jual beli harus berpedoman terhadap Al-Qur'an serta hadis Rasulullah terutama untuk masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. QRIS juga mengacu kepada salah satu prinsip *muamalah* yaitu *At-Tharadin* yang artinya baik pembeli maupun penjual sama-sama diuntungkan (suka sama suka) sehingga transaksi antar penjual dan pembeli menjadi terasa lebih sah. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional, transaksi keuangan dalam Islam perlu memerhatikan unsur *riba*, *gharar* dan *masyir*. Pembelian dengan menggunakan QRIS masih terus memerlukan sosialisasi terkait prosedur penggunaannya dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal tersebut disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan dan informasi yang didapatkanoleh masyarakat terhadap penggunaan sistem pembayaran non tunai atau cashless sehingga masyarakat lebih memilih sistem pembayaran secara tunai. (Destianingsih, 2021). Maraknya penggunaan metode *cashless* di kota-kota besar juga dapat mempengaruhi peredaran uang fisik di kalangan masyarakat sebab dalam transaksi *cashless* keberadaan uang fisik tidak dibutuhkan lagi meskipun penggunaan metode *cashless* belum dilakukan secara keseluruhan oleh masyarakat di Indonesia.

Dengan fenomena pembayaran dengan metode QRIS yang mulai marak dilakukan sebagai transaksi jual beli di Indonesia yang sudah dijabarkan di atas, maka peneliti bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pandangan Islam tentang metode pembayaran QRIS serta bagaimana QRIS dapat mempengaruhi peredaran uang fisik di kalangan masyarakat Indonesia dengan menggunakan metode studi pustaka dalam teknik pengumpulan data.

KAJIAN TEORI

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktik, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter yang disebutkan di atas merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan strategi dan transmisi yang dipilih, maka dirumuskan kerangka operasional kebijakan moneter (Perry Warjiyo, 2003).

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengelola pasokan uang suatu negara dengan tujuan khusus, seperti mengendalikan inflasi, mencapai tingkat kerja penuh, atau meningkatkan kesejahteraan. Ini melibatkan berbagai tindakan, termasuk mengatur suku bunga, persyaratan cadangan minimum, peningkatan modal bank, dan bahkan bertindak sebagai peminjam terakhir dalam situasi tertentu atau melalui perundingan dengan pemerintah lain. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) bertanggung jawab atas kebijakan moneter.

BI menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuannya, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Pada tahun 2020, Indonesia seperti banyak negara lainnya menghadapi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Bank Indonesia merespons

dengan mengurangi suku bunga acuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memberikan kelonggaran likuiditas kepada bank. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memitigasi dampak ekonomi negatif dari pandemi. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menerapkan kebijakan makroprudensial untuk mengendalikan risiko di sektor keuangan. Hal ini mencakup peraturan yang lebih ketat terkait pemberian kredit dan peningkatan persyaratan modal bank.

Bank Indonesia (BI) melaporkan peredaran uang kartal pada Agustus 2022 tercatat sebesar Rp805,5 triliun atau tumbuh sebesar 7,3 persen, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tumbuh 8,3 persen. Tabungan Rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu juga tercatat tumbuh melambat, dari pertumbuhan 11,1 persen pada bulan sebelumnya menjadi 9,9% pada Agustus 2022 atau tercatat sebesar Rp2.161,1 triliun pada posisi laporan. Giro Rupiah juga tercatat melambat dari 25,5 persen pada bulan sebelumnya menjadi 24,1 persen pada Agustus 2022.

Menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah melalui pengaturan jumlah mata uang beredar adalah contoh dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bila jumlah uang beredar terlalu tinggi, maka nilai uang akan jatuh menjadi tidak berharga dan harga akan naik, dan menyebabkan inflasi berlebihan atau hiperinflasi. Sebaliknya bila uang beredar terlalu rendah, maka akan kesulitan melakukan transaksi, serta harga barang akan turun (deflasi) yang menyebabkan perlambatan ekonomi. Tingkat nilai rupiah yang tidak stabil akan memberatkan pelaku ekonomi, baik eksportir, importir maupun konsumen. Bila inflasi terlalu tinggi, maka pelaku usaha sulit menjual barangnya dan konsumen akan sulit mendapatkan kebutuhannya. Karena itu bank sentral harus menjaga peredaran uang ini (Citra Amanda, 2022)

Uang beredar menurut pengertian luas dinamakan juga likuidita perekonomian atau M2 dan dalam pengertian sempit disingkat M1. Menurut www.bi.go.id Bank Indonesia mendefinisikan Uang Beredar dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah), sedangkan M2 meliputi M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun Uang Kuasi merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari Simpanan Berjangka dan Tabungan (rupiah dan valas) serta Simpanan Giro Valuta Asing. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan simpanan pihak ketiga pada Bank Umum dan BPR, yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Simpanan Berjangka dalam Rupiah dan Valas. Pada Uang Beredar, perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak termasuk simpanan yang diblokir karena kehilangan fungsinya sebagai uang. Sementara, dalam menganalisis perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) termasuk juga simpanan yang diblokir dan merupakan simpanan milik pihak ketiga (tidak termasuk simpanan milik Pemerintah Pusat dan Bukan penduduk), baik dalam Rupiah dan Valas, pada Bank Umum dan BPR (tidak termasuk kantor cabang yang beroperasi di luar wilayah Indonesia) dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Simpanan Berjangka (Bank Indonesia, 2016)

Kode QR Indonesia atau QRIS kini resmi didukung oleh Bank Indonesia. Setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Berbasis QR wajib memenuhi persyaratan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/2019 tentang Penerapan Standar Internasional QRIS untuk Pembayaran dengan Menggunakan QRIS yang diatur oleh Bank Indonesia. Assosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan Bank Indonesia bersama-sama menciptakan satu-satunya standar pembayaran QR Code untuk sistem pembayaran di Indonesia, yang dikenal sebagai QRIS (ASPI) (Dyah Ayu, 2020)

Kode QR adalah image berupa matriks dua dimensi yang memiliki kemampuan dalam melakukan penyimpanan data didalamnya. Kode QR adalah evolusi dari barcode atau kode dua

batang yang merupakan sebuah simbol yang berisi informasi dengan bentuk sebuah pola berwarna hitam putih agar mudah dipindai. Hal ini menyebab kode QR dapat menyimpan banyak informasi dalam satu matriks (Yasinta, 2017)

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar QR Code untuk dompet elektronik, mobile banking, dan aplikasi uang elektronik berbasis server. QR Code dapat digunakan untuk mengakomodasi berbagai jenis layanan pembayaran, tetapi untuk memastikan interoperabilitas dan efisiensi, Standar Nasional QR Code diperlukan. Dengan adopsi Standar Nasional QR Code, kode QR dapat digunakan secara konsisten oleh berbagai penyedia layanan pembayaran, sehingga mengurangi risiko fragmentasi industri sistem pembayaran dan memudahkan penggunaan pembayaran nontunai nasional. Standar Nasional QR Code mencakup aturan dan protokol yang ditetapkan oleh otoritas regulasi dan industri, yang menetapkan standar format, struktur data, dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan kode QR. Ini memungkinkan QR Code yang sama dapat digunakan oleh berbagai penyedia layanan pembayaran, serta memudahkan penggunaan pembayaran nontunai di seluruh wilayah dengan teknologi yang sama (Rini Mayanti, 2020)

Electronic payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. Electronic payment merupakan wakil dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis pembeli dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik. (Ming-Yen Teoh et al., 2013). Electronic payment digunakan pada saat ini untuk bertransaksi jarak jauh seperti online shopping, seiring dengan semakin bertumbuhnya penggunaan internet dan semakin banyaknya e-commerce, maka electronic payment adalah solusi yang hadir untuk menggantikan alat transaksi pembayaran cara lama. Yang termasuk dalam pembayaran elektronik adalah ATM, e-money, internet banking, kartu kredit, debit, mobile payment, mobile banking (Ming-Yen Teoh et al., 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif berarti penelitian yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode kuantitatif juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai ipteck baru dengan data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik. Menurut Sugiyono (2018, hlm.14) berpendapat bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik. Penelitian itu pada prinsipnya adalah untuk menjawab masalah. Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari obyek yang diteliti (preliminary study) untuk mendapatkan masalah melalui fakta-fakta empiris. Selanjutnya supaya masalah dapat dijawab dengan baik dibuat rumusan masalah secara spesifik dan pada umumnya dibuat dalam bentuk kalimat tanya.

Menurut Sinambela (2020) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan angka-angka dalam memproses data untuk menghasilkan informasi yang terstruktur. Karakteristik penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang menggambarkan karakteristik objek, peristiwa, atau situasi (Sekaran & Bougie, 2016: 43).

Menurut Sugiyono (2016) studi kepustakaan merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah, memperoleh data dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, peneliti terdahulu, jurnal dan artikel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengelola pasokan uang suatu negara dengan tujuan khusus, seperti mengendalikan inflasi, mencapai tingkat kerja penuh, atau meningkatkan kesejahteraan. Ini melibatkan berbagai tindakan, termasuk mengatur suku bunga, persyaratan cadangan minimum, peningkatan modal bank, dan bahkan bertindak sebagai peminjam terakhir dalam situasi tertentu atau melalui perundingan dengan pemerintah lain.

Menurut (Perry Warjiyo, 2003) Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/kesempatan kerja yang tersedia.

Kebijakan moneter yang disebutkan di atas merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan strategi dan transmisi yang dipilih, maka dirumuskan kerangka operasional kebijakan moneter.

Mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan tujuan dari kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pada pasal 7 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dimana yang dimaksud dengan "stabilitas nilai Rupiah" adalah ketabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah.

Penggunaan transaksi digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peredaran uang di Indonesia. QRIS adalah standar pembayaran digital yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran menggunakan kode QR melalui aplikasi e-wallet atau mobile banking. Penggunaan transaksi digital QRIS di Indonesia sudah cukup banyak, selain karena dianggap lebih memudahkan pembayaran QRIS juga dianggap lebih mengikuti *trend*.

Sistem pembayaran yang digunakan di suatu negara juga dapat mempengaruhi peredaran uang di suatu negara tersebut, termasuk salah satunya di Indonesia. Penggunaan pembayaran digital QRIS juga dinilai berpengaruh pada peredaran uang di Indonesia. Kebijakan moneter mempengaruhi keseimbangan ekonomi yang dimana pengaruhnya dimulai dari perubahan jumlah uang beredar yang kemudian mempengaruhi harga barang dan jasa. Perubahan harga akan mempengaruhi produksi yang kemudian mempengaruhi pendapatan masyarakat. Pengaruh ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kebijakan moneter

merupakan suatu kebijakan yang penting di samping kebijakan fiscal dan kebijakan lainnya di dalam perekonomian.

Jumlah uang beredar di luar kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Daripada itu, di bawah ini merupakan table yang memuat data peredaran uang di beberapa tahun terakhir, mulai dari tahun yang belum terlalu banyak penggunaan transaksi menggunakan digital QRIS sampai pada saat ini yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa pembayaran digital QRIS sudah banyak digunakan.

DATA PEREDARAN UANG KARTAL DAN GIRAL DARI 2018-2023 (Dalam Miliar)															
Tahun	Jenis Uang	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	Jumlah	
2018	Uang Kartal	532131	531209	549216	549587	580625	605973	583306	587788	590805	581592	586236	625370	6903839	
	Uang Giral	794611	820049	811919	822989	824002	846382	800197	796477	820868	828986	819028	831779	9817285	
2019	Uang Kartal	579294	570435	585579	592935	675635	625354	619652	622452	614231	611081	622384	654683	7373715	
	Uang Giral	796842	815894	843027	861343	832405	888166	868149	853092	949371	893075	930751	910675	10442790	
2020	Uang Kartal	616129	607961	620353	634149	685044	651818	668108	661168	674441	707854	712636	760045	7999706	
	Uang Giral	868273	897529	1028328	942253	968566	985933	1015085	1098471	1106280	1074390	1086451	1095580	12167141	
2021	Uang Kartal	712529	698227	692478	732644	743534	739006	758703	750510	748616	766704	775051	831234	8949236	
	Uang Giral	1049766	1086537	1134913	1118307	1118233	1176423	1174588	1187880	1219818	1304714	1339652	1450967	14361798	
2022	Uang Kartal	765015	795951	792518	896318	820155	815316	822043	805459	807818	808649	840492	897799	9867532	
	Uang Giral	1384536	1399667	1462073	1430891	1482756	1524134	1474003	1473704	1513065	1730418	1627459	1710998	18213704	
2023	Uang Kartal	830373	813834	832817	895719	859517	879805	853336	851723	865392	863102	893165	975928	10414708	
	Uang Giral	1591801	1589760	1575602	1577150	1563801	1586288	1584723	1559128	1616837	1634608	1617603	1699406	19196708	

Dari data di atas yang di dapat dari Badan Pusat Statistik mengenai peredaran uang di Indonesia dapat disimpulkan bahwa peredaran uang di negara meningkat setiap tahunnya. Terlepas dari beberapa penggunaan transaksi digital yang sudah banyak digunakan, tetapi dilihat dari data yang tersedia, peredaran uang kartal di Indonesia juga masih tinggi.

Penggunaan transaksi digital QRIS yang sebenarnya sudah cukup banyak digunakan di Indonesia, ternyata masih belum bisa menjadi pengaruh besar untuk mengurangi peredaran uang di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa transaksi menggunakan uang digital atau menggunakan QRIS juga dapat mempengaruhi peredaran uang di suatu negara karena sebagai berikut:

1. Penggunaan QRIS dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap uang tunai. Dengan adanya transaksi digital, orang tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, sehingga mengurangi risiko kehilangan uang atau pencurian. Hal ini juga dapat membantu mengurangi biaya produksi, distribusi, dan pengamanan uang fisik.
2. Penggunaan QRIS juga dapat membantu pemerintah dalam mengawasi dan memantau peredaran uang secara lebih efektif. Dengan transaksi digital, data transaksi dapat tercatat secara otomatis dan transparan, sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan analisis terhadap pola pengeluaran masyarakat dan memantau potensi tindakan keuangan ilegal.

Secara keseluruhan, penggunaan transaksi digital QRIS dengan cash memiliki potensi besar untuk mengubah pola peredaran uang di Indonesia menuju ke arah yang lebih efisien, transparan, dan aman. Pemerintah dan pelaku industri perbankan perlu terus mendorong adopsi

teknologi ini serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkannya secara optimal.

Jika dilihat dari table di atas penggunaan kedua transaksi tersebut saling memberi pengaruh yang baik bagi perekonomian di Indonesia, dimana transaksi non-tunai (QRIS) tidak hanya memberikan kenyamanan, dan penghematan waktu transaksi, tetapi juga memberikan potongan harga dari promosi yang diadakan perusahaan layanan tersebut bagi pengguna. Begitu pula dengan transaksi tunai (cash) lebih mudah dilakukan oleh sebagian orang yang belum terlalu mengerti tentang teknologi, karena menurut mereka transaksi dengan cash merupakan kegiatan yang sudah ada sejak dahulu dan terbiasa digunakan.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan pembayaran. Tercapainya kebijakan moneter di Indonesia dalam transaksi melibatkan beberapa aspek:

1. Stabilitas Harga: Tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia adalah menjaga stabilitas harga. Hal ini mencakup pengendalian inflasi agar tetap berada dalam kisaran target yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pertumbuhan Ekonomi: Selain stabilitas harga, kebijakan moneter juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menjaga suku bunga pada tingkat yang wajar.
3. Keseimbangan Pembayaran: Kebijakan moneter juga berperan dalam menjaga keseimbangan pembayaran negara. BI dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengatur nilai tukar rupiah agar tetap kompetitif dan mengendalikan arus masuk dan keluar modal.

Dalam transaksi, kebijakan moneter yang efektif dapat tercermin dalam berbagai indikator ekonomi, seperti tingkat inflasi yang stabil, suku bunga yang terkendali, pertumbuhan kredit yang sehat, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran. Terlebih lagi, kebijakan moneter yang baik juga dapat menciptakan kepercayaan pasar, yang penting dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan dan memfasilitasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peredaran uang di Indonesia meningkat setiap tahunnya, transaksi digital QRIS yang sudah cukup banyak digunakan di Indonesia bisa dikatakan belum begitu berpengaruh dalam mengurangi peredaran uang di masyarakat. Penggunaan transaksi digital QRIS bisa dikatakan berpengaruh bagi peredaran uang di Indonesia saat memang diikuti dengan pemberlakuan kebijakan-kebijakan lainnya. Seperti kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh Bank Sentral yaitu dengan meminimalisir jumlah uang yang beredar di masyarakat, karena dengan kebijakan ini dapat membantu menyeimbangkan neraca pembayaran serta menstabilkan harga. Dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat oleh otoritas moneter sebagai salah satu kebijakan moneter sehingga terjadi perubahan suku bunga uang maka pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga serta keseimbangan neraca pembayaran dapat tercapai dan sasaran ekonomi makro dapat terwujud.

KESIMPULAN

Dari data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik mengenai peredaran uang di Indonesia dapat disimpulkan bahwa peredaran uang di negara meningkat setiap tahunnya. Terlepas dari beberapa penggunaan transaksi digital yang sudah banyak digunakan, tetapi dilihat dari data yang tersedia, peredaran uang kartal di Indonesia juga masih tinggi. Penggunaan transaksi digital QRIS

yang sebenarnya sudah cukup banyak digunakan di Indonesia, ternyata masih belum bisa menjadi pengaruh besar untuk mengurangi peredaran uang di Indonesia.

Secara keseluruhan, penggunaan transaksi digital QRIS dengan cash memiliki potensi besar untuk mengubah pola peredaran uang di Indonesia menuju ke arah yang lebih efisien, transparan, dan aman. Pemerintah dan pelaku industri perbankan perlu terus mendorong adopsi teknologi ini serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkannya secara optimal.

Walaupun pada zaman modern ini sudah banyak transaksi digital, tetapi hal itu tidak mempengaruhi peredaran uang Indonesia. Masyarakat masih banyak menggunakan uang cash dan masih banyak juga yang beradaptasi dengan pembayaran transaksi digital QRIS ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Desy Tri. 2016. "Analisa Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2005-2014." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Moneter Universitas Bina Sarana Informatika* 3(1):161–69.
- Bariroh, Muflihatul. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 2(2):102–26.
- Efendi, Muhammad Nur, Muhammad Ikbar Najmi, and Akhmad Sayuti. 2023. "Hukum Uang Digital Menurut Pandangan Islam." *Journal Islamic Education* 1:111–18.
- Muliati, Arfiah Besari, and Akhmad Noor. 2021. "Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Indonesia." *Inovasi* 17(January 2010):466–75.
- Puriati, Ni Made, I. Wayan Sugiartana, and Ni Putu Erma Mertaningrum. 2023. "Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Umkm Di Kabupaten Karangasem." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 13(3):332–38. doi: 10.23887/jiah.v13i3.70942.
- Puspitaningrum, Fitri, Sophie Cintya Kusumastuti, and Anik Rimbawati. 2023. "Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Jual Beli Di Tengah Masyarakat UMKM Ketintang Surabaya." *Prosiding Seminar Nasional* 603–14.
- Rahimah, Afiatur, and Pitri Yani. 2023. "The Effectiveness of Qris Payments in an Islamic Perspective Based on PADG No.24/1/PADG/2022." *An Nuqud* 2(1):34–39. doi: 10.51192/annuqud.v2i1.426.
- Rizkyandy, Riyand. 2016. "Apa Yang Harus Dipertimbangkan Sebagai Penerimaan Pembayaran Mobile: Investigasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Untuk Menggunakan Sistem Layanan T-Cash." *E-Journal Uajy* (July):1–23.
- Santoso, Sugeng. 2016. "Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3(1). doi: 10.21274/an.2016.3.1.59-86.
- Saputri, Oktoviana Banda. 2020. "Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital." *Journals of Economics and Business Mulawarman* 17(2):1–11.
- Sardjonopermono, Iswardono. 1998. "Kebijakan Moneter : Teori Dan Bukti Empiris." 3.
- Shabrina, Yashinta Eltrixia, and Rahmah Yulisa Kalbarini. 2024. "Penggunaan QRIS Sebagai Sistem Pembayaran Pada Coffe Shop Di Kota Pontianak Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 5(1):287–93.
- Tarantang, Jefri, Rahmad Kurniawan, and Gusti MUhammad Ferry Firdaus. 2020. "Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam." *An Nisbah Jurnal Ekonomi Islam* 7(1).

- Tobing, Gabriella Junita, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. 2018. "Penerapan Qrcode Sebagai Media Pelayanan Untuk Absensi Pada Website Berbasis Php Native." *Sisfotenika* 8(1):47. doi: 10.30700/jst.v8i1.151.
- Ambarani, Lestari. 2015. *Ekonomi Moneter*. Bogor: IN Media.
- Anuar, Khairul. 2008. *Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam Analisis Kebijakan Mahathir Mohammad Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Malaysia Tahun 1997-1998*. Vol. 3.
- I Wayan Sudirman. 2011. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter*. edited by Suwito. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Oktaviyanti Panjaitan, Lystia, and Nurbetty Herlina Sitorus. 2022. "Analisis Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Peredaran Uang Tunai Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3(10):1117–30. doi: 10.36418/jist.v3i10.521.
- Permana, Rendi, Rezi Attaullah, Yolanda Pratiwi, Sartika Apri Yanti, Alvin Darmawan, and Diwayana Putri Nasution. 2024. "Dampak Implementasi QRIS Terhadap Perubahan Sistem Keuangan Nasional." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 3(1):218–27.
- Pohan, Aulia. 2008. *Kerangka Kebijakan Moneter Dan Implementasinya Di Indonesia*. edited by S. Rinaldy. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, Angelica Putri. 2021. "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik, Jumlah Uang Beredar, Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (September):189–200.